

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 32);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 56);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 57);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 124)

26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 113) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 33);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 71);
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 64)
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 104).

1.3.Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

3.1. Rincian dan Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

3.2. Rincian dan Penjelasan Laporan Operasional

3.3. Rincian dan Penjelasan Neraca

3.4. Rincian dan Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non keuangan SKPD

Bab V Penutup

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

URAIAN	JUMLAH		SELISIH	%
	ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2,540,358,773.00	2,906,763,982.00	366,405,209.00	114.42
Retribusi Daerah	1,828,256,773.00	2,118,929,982.00	290,673,209.00	115.90
Lain-lain PAD yang Sah	712,102,000.00	787,834,000.00	75,732,000.00	110.63
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,540,358,773.00	2,906,763,982.00	366,405,209.00	114.42
JUMLAH PENDAPATAN	2,540,358,773.00	2,906,763,982.00	366,405,209.00	114.42
BELANJA				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	698,030,000.00	667,923,106.00	30,106,894.00	95.69
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	698,030,000.00	667,923,106.00	30,106,894.00	95.69
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	698,030,000.00	667,923,106.00	30,106,894.00	95.69
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	698,030,000.00	667,923,106.00	30,106,894.00	95.69

URAIAN	JUMLAH		SELISIH	%
	ANGGARAN	REALISASI		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1,305,215,000.00	1,292,884,193.00	12,330,807.00	99,05
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1,045,465,000.00	1,038,379,480.00	7,085,520.00	99.32
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	928,000,000.00	922,294,275.00	5,705,725.00	99.39
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	120,000,000.00	119,999,600.00	400.00	100.00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	808,000,000.00	802,194,675.00	5,805,325.00	99.28
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	117,465,000.00	116,085,205.00	1,379,795.00	98.82
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	79,150,100.00	77,800,260.00	1,349,840.00	98.29

URAIAN	JUMLAH		SELISIH	%
	ANGGARAN	REALISASI		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	38,314,900.00	38,284,945.00	29,955.00	99.92
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	100,750,000.00	96,170,560.00	4,579,440.00	95.45
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	25,750,000.00	21,327,392.00	4,422,608.00	82.82
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	25,750,000.00	21,327,392.00	4,422,608.00	82.82
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	75,000,000.00	74,843,168.00	156,832.00	99.79
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	75,000,000.00	74,843,168.00	156,832.00	99.79
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	159,000,000.00	158,434,153.00	565,847.00	99,64
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	159,000,000.00	158,434,153.00	565,847.00	99,64
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	36,000,000.00	35,947,430.00	52,570.00	99.85
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	48,000,000.00	47,700,000.00	300,000.00	99,37

URAIAN	JUMLAH		SELISIH	%
	ANGGARAN	REALISASI		
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	75,000,000.00	74,786,723.00	213,277.00	99.71
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	9,858,124,585.00	9,773,806,292.00	84,318,293.00	99.14
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	9,858,124,585.00	9,773,806,292.00	84,318,293.00	99.14
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	9,858,124,585.00	9,773,806,292.00	84,318,293.00	99.14
Pengembangan Lumbung Mataraman	9,858,124,585.00	9,773,806,292.00	84,318,293.00	99.14
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	106,552,371,343.00	102,138,851,308.00	4,413,520,035.00	95.85
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	51,643,971,631.00	50,881,030,815.00	762,940,816.00	98.52
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73,098,700.00	73,097,600.00	1,100.00	100.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28,678,400.00	28,678,200.00	200.00	100.00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18,595,100.00	18,594,500.00	600.00	100.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,825,200.00	25,824,900.00	300.00	100.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44,759,607,523.00	44,263,470,360.00	496,137,163.00	98.89

URAIAN	JUMLAH		SELISIH	%
	ANGGARAN	REALISASI		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44,611,592,523.00	44,115,465,575.00	496,126,948.00	98.88
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	134,820,000.00	134,820,000.00	-	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13,195,000.00	13,184,785.00	10,215.00	99.92
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	380,465,858.00	380,465,858.00	-	100.00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	293,345,858.00	293,345,858.00	-	100.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	87,120,000.00	87,120,000.00	-	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33,822,000.00	33,715,394.00	106,606.00	99.68
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	33,822,000.00	33,715,394.00	106,606.00	99.68
Administrasi Umum Perangkat Daerah	368,516,300.00	353,583,581.00	14,932,719.00	95.94
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45,073,100.00	44,252,400.00	820,700.00	98.18
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101,148,600.00	99,963,399.00	1,185,201.00	98.83
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11,537,500.00	11,276,446.00	261,054.00	97.74
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74,884,900.00	73,823,551.00	1,061,349.00	98.58
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	13,129,200.00	11,940,000.00	1,189,200.00	90.94
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	122,743,000.00	112,327,785.00	10,415,215.00	91.51
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	371,000,900.00	342,568,865.00	28,432,035.00	92.34

URAIAN	JUMLAH		SELISIH	%
	ANGGARAN	REALISASI		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	318,776,000.00	290,720,200.00	28,055,800.00	91.20
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52,224,900.00	51,848,665.00	376,235.00	99.28
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,953,026,950.00	3,832,928,407.00	120,098,543.00	96.96
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,400,000.00	2,400,000.00	-	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	981,778,750.00	885,445,964.00	96,332,786.00	90.19
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,968,848,200.00	2,945,082,443.00	23,765,757.00	99.20
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,704,433,400.00	1,601,200,750.00	103,232,650.00	93.94
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68,570,000.00	68,110,500.00	459,500.00	99.33
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,086,272,700.00	995,098,090.00	91,174,610.00	91.61
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106,870,000.00	106,268,260.00	601,740.00	99.44
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	343,882,900.00	333,641,500.00	10,241,400.00	97.02
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98,837,800.00	98,082,400.00	755,400.00	99.24
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	25,550,229,950.00	25,105,973,511.00	444,256,439	98.26

URAIAN	JUMLAH		SELISIH	%
	ANGGARAN	REALISASI		
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3,958,575,200.00	3,735,030,191.00	223,545,009.00	94.35
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	189,500,000.00	186,393,000.00	3,107,000.00	98.36
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3,769,075,200.00	3,548,637,191.00	220,438,009.00	94.15
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1,680,232,850.00	1,627,578,820.00	52,654,030.00	96.87
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	104,010,800.00	103,343,800.00	667,000.00	99.36
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	474,777,350.00	467,205,250.00	7,572,100.00	98.41
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	1,019,458,500.00	975,043,570.00	44,414,930.00	95.64
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	81,986,200.00	81,986,200.00	-	100.00
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	19,911,421,900.00	19,743,364,500.00	168,057,400.00	99.16
Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	16,470,449,900.00	16,376,636,000.00	93,813,900.00	99.43

URAIAN	JUMLAH		SELISIH	%
	ANGGARAN	REALISASI		
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3,440,972,000.00	3,366,728,500.00	74,243,500.00	97.84
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	24,739,697,600.00	21,887,845,457.00	2,851,852,143.00	88.47
Penataan Prasarana Pertanian	24,739,697,600.00	21,887,845,457.00	2,851,852,143.00	88.47
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	265,418,300.00	263,219,990.00	2,198,310.00	99.17
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2,317,569,600.00	2,266,274,158.00	51,295,442.00	97.78
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	22,156,709,700.00	19,358,351,309.00	2,798,358,391.00	87.37
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1,378,404,300.00	1,346,299,841.00	32,104,459.00	97.67
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	112,920,000.00	107,984,900.00	4,935,100.00	95.63

URAIAN	JUMLAH		SELISIH	%
	ANGGARAN	REALISASI		
Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	112,920,000.00	107,984,900.00	4,935,100.00	95.63
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	683,000,000.00	678,831,000.00	4,169,000.00	99.39
Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	103,000,000.00	102,385,000.00	615,000.00	99.40
Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	580,000,000.00	576,446,000.00	3,554,000.00	99.39
Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	573,000,000.00	550,404,641.00	22,595,359.00	96.06
Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	573,000,000.00	550,404,641.00	22,595,359.00	96.06
Kesejahteraan Hewan	9,484,300.00	9,079,300.00	405,000.00	95.73
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	9,484,300.00	9,079,300.00	405,000.00	95.73
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	106,000,000.00	105,233,681.00	766,319.00	99.28
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	106,000,000.00	105,233,681.00	766,319.00	99.28
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	106,000,000.00	105,233,681.00	766,319.00	99.28

URAIAN	JUMLAH		SELISIH	%
	ANGGARAN	REALISASI		
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3,134,067,862.00	2,812,368,003.00	321,699,859.00	89.74
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	187,638,200.00	181,863,115.00	5,775,085.00	96.92
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	187,638,200.00	181,863,115.00	5,775,085.00	96.92
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	2,946,429,662.00	2,630,504,888.00	315,924,774.00	89.28
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2,788,921,162.00	2,473,091,388.00	315,829,774.00	88.68
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	157,508,500.00	157,413,500.00	95,000.00	99.94
TOTAL	118.413.740.928,00	113.873.364.899,00	4.540.376.029,00	96,17

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Secara umum hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target antara lain disebabkan karena :

- a. Untuk kegiatan yang bersifat rutin seperti pembayaran jasa telepon, listrik dan air yang menyesuaikan kebutuhan.
- b. Adanya efisiensi penggunaan anggaran karena digitalisasi proses pengadaan dan efisiensi sarana mobilitas.
- c. Adanya sisa mati lelang

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 RINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1 Pendapatan-LRA

3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp2.906.763.982,00	Rp2.042.663.349,00

Pendapatan-LRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp2.540.358.773,00 dan realisasi sebesar Rp2.906.763.982,00 atau 114,42% dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi-LRA

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp2.118.929.982,00	Rp1.613.250.714,00

Pendapatan Retribusi-LRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Retribusi Jasa Usaha atas Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Pendapatan Retribusi-LRA dianggarkan sebesar Rp1.828.256.773,00 dan realisasi sebesar Rp2.118.929.982,00 atau 115,90% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Retribusi Jasa Usaha			
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	276.828.223,00	433.795.882,00	156,70
2	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.551.428.550,00	1.685.134.100,00	108,62
	Jumlah	1.828.256.773,00	2.118.929.982,00	115,90

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terdiri dari
 - a. Retribusi Pemakaian Laboratorium dianggarkan sebesar Rp265.028.223,00 dan terealisasi sebesar Rp410.045.882,00 atau 154,72%. Pendapatan ini dihasilkan oleh UPTD BP3MBTP dan UPTD BPPTDK.. Pada tahun 2023 pendapatan dalam sektor ini dapat melampaui target. Pada UPTD BP3MBTP, hal ini terjadi karena adanya permintaan uji laboratorium Jagung Hibrida yang akan digunakan sebagai bantuan oleh Kementerian Pertanian. Sementara itu, pada UPTD BPPTDK, pendapatan melampaui target karena meningkatnya permintaan uji laboratorium sehubungan dengan belum dibukanya pengujian oleh Balai Besar Veteriner yang menunggu peraturan tarif dari Pemerintah Pusat.
 - b. Retribusi Pemakaian Ruangan dianggarkan sebesar Rp11.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp23.750.000,00 atau 201%. Pendapatan ini dihasilkan oleh Induk DPKP DIY dan UPTD BPSDMP. Pada induk, sewa berupa pemakaian dua ruangan kantin, yang mana realisasi kurang dari target . Hal ini dikarenakan pemakaian salah satu kantin hanya terelalisasi 4 bulan dan sebab alasan ekonomi, penyewa tidak bisa melanjutkan kontrak. Selain itu retribusi pemakaian ruangan juga dihasilkan UPTD BPSDMP berupa sewa kamar dikarenakan meningkatnya permintaan.

2. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, terdiri dari
 - a. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman dianggarkan sebesar Rp628.731.750,00 dan terealisasi sebesar Rp610.803.250,00 atau 97,15%. Retribusi ini merupakan pendapatan yang terdapat pada UPTD BP3MBTP berupa penjualan benih tanaman dari sektor Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan.
 - b. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak dianggarkan sebesar Rp399.022.700,00 dan terealisasi sebesar Rp397.366.600,00 atau 99,58%. Retribusi ini merupakan pendapatan yang terdapat di UPTD BPPTDK berupa penjualan hasil produksi berupa semen beku.
 - c. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan dianggarkan sebesar Rp523.674.100,00 dan terealisasi sebesar Rp676.964.250,00 atau 129,27%. Pendapatan ini dihasilkan oleh UPTD BPTP dan UPTD BPPTDK. Pada UPTD BPTP, realisasi kurang dari target dikarenakan adanya

sisia APH yang belum terjual, yaitu PGPR 10 liter dan *Paenibacillus pollimixa* 10 liter. Hal ini diakibatkan oleh adanya beberapa preferensi pemasok bagi pembeli. Sedangkan pada UPTD BPPTDK, penerimaan berhasil melampaui target dikarenakan harga susu berhasil disepakati oleh pihak pembeli dan penjualan ternak dilakukan secara lelang sehingga harga menjadi lebih tinggi dari harga terendah yang telah ditetapkan.

3.1.1.1.2 Lain-lain PAD yang Sah

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp787.834.000,00	Rp429.412.635,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 712.102.000,00 dan realisasi sebesar Rp785.109.000,00 atau 110,63 % berasal dari Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya dan hasil sewa BMD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya			
	Hasil Penjualan Hewan	70.875.000,00	130.834.000,00	184,60
	Hasil Penjualan Tanaman	57.227.000,00	72.870.000,00	127,33
2	Hasil Sewa BMD			
	Hasil Sewa BMD	584.000.000,00	584.000.000,00	100,00
3	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain			
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	130.000,00	-
	Jumlah	712.102.000,00	787.834.000,00	110,63

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil penjualan Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp128.102.000,00 dan terealisasi Rp203.704.000,00 atau 159,02%. Hal ini dikarenakan tingginya permintaan

masyarakat terhadap ayam Jantan yang dijual. Selain itu, penjualan tanaman pada UPTD BPSDMP juga meningkat karena distribusi terdorong oleh kegiatan Gebyar Perbenihan.

2. Pendapatan Hasil Sewa BMD dapat memenuhi target 100 %.
3. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sejumlah Rp130.000,00 merupakan saldo mutasi masuk ke rekening Bendahara Penerimaan yang tidak diketahui sumbernya.

3.1.2 Belanja-LRA

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp113.873.364.899,00	Rp98.944.053.222,00

Belanja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp118.413.740.928,00 dengan realisasi sebesar Rp113.873.364.899,00 atau 96.17%. Anggaran Belanja DPKP DIY berasal dari dua sumber. Pertama, APBD murni dengan anggaran sebesar Rp103.440.805.221,00 dan realisasi sebesar Rp88.502.323.824,00 atau 85,56% Kedua, Dana Keistimewaan (DAIS) yang terdiri dari dua urusan, yaitu Kebudayaan dan Tata Ruang. DAIS Urusan Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp9.858.124.585,00 terealisasi sebesar Rp9.773.806.292,00 atau 99,14%. Sedangkan DAIS Urusan Tata Ruang dengan anggaran Rp698.030.000 terealisasi Rp667.923.106,00 atau 95,69% . Adapun Rincian realisasi belanja sebagai berikut:

3.1.2.1 Belanja Operasi

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp90.330.248.944,00	Rp94.730.212.518,00

Belanja Operasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp92.116.199.843,00 dan realisasi sebesar Rp90.330.248.944,00 atau 98,06%, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.2.1.1 Belanja Pegawai

8	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Diklat	199.370.000,00	198.454.025,00	99,54
9	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	312.058.200,00	290.379.825,00	93,05
10	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	305.372.700,00	296.471.050,00	97,08
11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.065.590.000,00	2.021.507.639,00	97,87
12	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	191.900.000,00	191.900.000,00	100
	Jumlah	25.972.595.320,00	25.060.289.066,00	96,49

Deviasi terbesar ada pada rician objek berupa Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. Hal ini dikarenakan pengeluarannya menyesuaikan kebutuhan.

3.1.2.1.3 Belanja Hibah

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp20.932.554.303,00	Rp26.831.764.685,00

Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp21.310.072.000,00 dan realisasi mencapai Rp20.932.554.303,00 atau 98,23% dengan rincian sebagai berikut.

Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		
Alat mesin pertanian	2.004.856.000	1.822.344.000
Budidaya tanaman ubi kayu	14.000.000	11.877.000
Pupuk organik untuk lahan sawah	125.000.000	117.187.500
Budidaya tanaman buah	450.000.000	434.289.500

Budidaya tanaman hidroponik	10.000.000	9.900.000
Budidaya tanaman kakao	28.125.000	28.120.000
Budidaya tanaman kelapa genjah kopyor	223.000.000	219.905.000
Budidaya tanaman kopi	37.500.000	37.500.000
Budidaya tanaman the	23.437.500	23.440.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani		
Rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT)	1.537.500.000	1.486.786.000
Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu		
Rehabilitasi tanaman kakao	260.850.000	235.990.000
Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		
Sarana budidaya ayam local	892.500.000	872.510.400
Sarana budidaya kambing	4.597.800.000	4.545.332.700
Sarana budidaya sapi	10.464.000.000	10.463.604.000
Pengembangan Lumbung Mataraman		
Gabah Kering Giling (GKG)	200.000.000	199.961.600
Rumah burung hantu	102.003.500	92.840.000
Sarana dan Prasarana Alat Pengolahan <i>Frozen Food</i>	31.500.000	31.500.000
Pengembangan pertanian di lahan sempit perkotaan	20.000.000	19.891.000
Budidaya Sistem Sabuk Gunung	118.000.000	116.898.840
Pengembangan olahan pangan local	110.000.000	109.010.000
Pengembangan Unit Pengolah Hasil (UPH) Tanaman Pangan	60.000.000	59.096.400
Jumlah	21.310.072.000	20.932.554.303

3.1.2.2 Belanja Modal

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp23.543.115.955,00	Rp4.213.840.704,00,00

Belanja Modal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp26.297.541.085,00 dan realisasi sebesar Rp23.543.115.955,00 atau 89,52%, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp 9.530.312.282,00	Rp3.439.662.024,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp10.369.166.800,00 dan realisasi sebesar Rp9.530.312.282,00 atau 91,91%, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Alat Bantu	578.000.000,00	574.100.000,00	99,33
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	517.166.000,00	445.157.000,00	86,08
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.894.800,00	1.890.000,00	99,75
4	Belanja Modal Alat Pengolahan	7.003.656.000,00	6.294.742.152,00	89,85
5	Belanja Modal Alat Kantor	244.248.200,00	243.286.000,00	99,61
6	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	258.150.100,00	254.866.130,00	98,73
7	Belanja Modal Alat Studio	26.919.100,00	26.911.000,00	99,97
8	Belanja Modal Alat Kedokteran	143.394.500,00	143.390.000,00	100,00
9	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.395.140.300,00	1.357.330.000,00	97,29
10	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	2.851.200,00	2.850.000,00	99,96

11	Belanja Modal Komputer Unit	136.567.200,00	127.275.000,00	93,20
12	Belanja Modal Peralatan Komputer	35.864.400,00	35.200.000,00	98,15
13	Belanja Modal Sumur	25.315.000,00	25.315.000,00	100,00
	Jumlah	10.369.166.800,00	9.530.312.282,00	99,33

Rician Objek dengan deviasi terbesar meliputi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor, Belanja Modal Alat Pengolahan, serta Belanja Modal Komputer Unit. Hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi pengadaan dengan sistem lelang.

3.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

2023 2022 (Audited)
Rp12.994.325.977,00 Rp 241.768.000,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp14.879.781.785,00 dan realisasi sebesar Rp12.994.325.977,00 atau 87,33% , dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	196.121.600,00	194.586.000,00	99,22
2	Belanja Modal Bangunan Gudang	1.116.724.435,00	994.218.401,00	89,03
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	7.650.887.200,00	6.257.563.601,00	81,79
4	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	147.000.000,00	146.592.000,00	99,72
5	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	687.866.000,00	550.636.390,00	80,05
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.964.495.665,00	1.734.188.900,00	88,28
7	Belanja Modal Pagar	3.116.685.885,00	3.116.540.685,00	100,00
	Jumlah	14.879.781.785,00	12.994.325.977,00	87,33

Adanya deviasi pada beberapa rekening sesuai dengan tabel terjadi karena adanya efisiensi lelang pengadaan konstruksi.

3.1.2.2.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp844.077.696,00	Rp442.805.930,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp873.592.500,00 dan realisasi sebesar Rp844.077.696,00 atau 96,62%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Jalan Lainnya	863.592.500,00	834.077.696,00	96,58
2	Belanja Modal Instalasi Lain	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	Jumlah	873.592.500,00	844.077.696,00	96,62

3.1.2.2.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp174.400.000,00	Rp89.604.750,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp175.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp174.400.000,00 atau 99,66% dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
2	Belanja Modal Ternak Lainnya	170.000.000,00	169.400.000,00	99,65

Jumlah	175.000.000,00	174.400.000,00	99,66
--------	----------------	----------------	-------

3.2 RINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

3.2.1 Pendapatan –LO

Pendapatan-LO Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.779.488.479,57 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut :

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp1.456.896.744,50	Rp969.295.849,00

Pendapatan Asli Daerah –LO Tahun 2023 sebesar Rp1.456.896.744,50 meliputi Pendapatan Retribusi Daerah-LO, dan Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian sebagai berikut:

3.2.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp669.062.744,50	Rp539.883.214,00

Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp669.062.744,50 terdiri dari Pendapatan Retribusi yang sudah diterima oleh Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
Retribusi Pemakaian Laboratorium	410.045.882,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	23.750.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	61.623.262,50
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan	173.643.600,00
Jumlah	669.062.744,50

3.2.1.1.2 Lain-Lain PAD yang Sah-LO

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp787.834.000,00	Rp429.412.635,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO sebesar Rp787.834.000,00 terdiri dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Hasil Penjualan Hewan	130.834.000,00
Hasil Penjualan Tanaman	72.870.000,00
Hasil Sewa BMD-LO	584.000.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	130.000,00
Jumlah	787.834.000,00

3.2.1.2 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp1.322.591.735,07	Rp1.294.376.918,61

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp1.322.591.735,07 dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa hibah sebesar Rp459.456.840,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Hibah barang berupa Alat Pendingin (*Cold Storage*) dengan nilai buku sebesar Rp243.706.840,00 dari Badan Pangan Nasional sebagaimana tertuang dalam BAST Nomor 885/PL.02.03/A/04/2023 tanggal 3 April 2023.

- b. Hibah barang berupa Ternak Sapi Simental Jantan senilai Rp70.000.000,00 dari Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas, Kementan RI sebagaimana tertuang dalam BAST Nomor 478/PL.130/F2.G/05/2023 pada tanggal 10 Mei 2023.
 - c. Hibah barang berupa Ternak Pedet Jantan senilai Rp10.000.000,00 dari Balai Embrio Ternak Cipelang Kementan RI sebagaimana tertuang dalam BAST Nomor B-11003/PK.010/F2.D/2023 tanggal 11 Mei 2023.
 - d. Hibah barang berupa Mini Bus dengan nilai buku Rp135.750.000,00 dari Badan Pangan Nasional sebagaimana tertuang dalam BAST Nomor 1221/PL.02.03/A/05/2023 tanggal 15 Mei 2023.
 - e. Hibah barang berupa sepeda motor yang telah digunakan sebagai penunjang tugas di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dengan nilai buku Rp0,00 dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian sebagaimana tertuang dalam BAST Barang Milik Negara Nomor 15212/PL.130/I.1/06/2022 tanggal 7 Juni 2022.
2. Pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan dalam negeri berupa persediaan sebesar Rp863.134.895,07. Nilai merupakan dari penambahan hasil inventaris yang terdiri dari :
- a) Penambahan bibit tanaman pada Jogja Agro Park (JAP) senilai Rp108.099.000,00.
 - b) Penambahan hasil inventarisasi ternak Jogja Agro Park (JAP) senilai Rp81.500.000,00.
 - c) Penambahan persediaan dari hasil produksi sebesar Rp.673.535.895,07.

3.2.2 Beban-LO

Realisasi Beban Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp95.792.926.472,97 yang terdiri dari Beban Operasional, Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan rincian sebagai berikut:

3.2.2.1 Beban Operasi

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp89.759.251.089,62	Rp 93.752.175.047,49

Beban Operasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Tahun 2023 sebesar Rp89.759.251.089,62 yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, dan Beban Hibah dengan rincian sebagai berikut:

3.2.2.1.1 Beban Pegawai

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp 44.337.405.575,00	Rp 47.232.999.808,00

Beban Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY pada Tahun 2023 sebesar Rp44.337.405.575,00 merupakan kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan yang belum berstatus PNS atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2023	2022
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	22.592.490.322,00	23.991.979.208,00
Beban Gaji Pokok ASN	17.266.071.192,00	18.469.169.032,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	1.251.509.620,00	1.335.268.978,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	321.475.000,00	409.025.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	1.291.115.000,00	1.192.870.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	339.205.000,00	386.575.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	705.805.320,00	754.543.501,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	67.913.251,00	69.306.319,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	188.616,00	207.774,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.219.184.348,00	1.235.814.986,00

Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	35.226.286,00	37.206.887,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	94.414.589,00	101.991.731,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	21.469.698.250,00	22.975.683.150,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	10.352.310.800,00	10.935.140.819,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0	102.247.871,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	11.117.387.450,00	11.938.294.460,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	275.599.103,00	265.337.450,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	53.659.103,00	42.247.450,00
Beban Honorarium	134.820.000,00	135.970.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	87.120.000,00	87.120.000,00
Jumlah	44.337.405.575,00	47.232.999.808,00

3.2.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp23.620.074.706,31	Rp46.517.496.141,49

Beban Barang Jasa sebesar Rp23.620.074.706,31 merupakan penurunan manfaat ekonomis dalam periode tahun 2023 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset, dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 per obyek beban sebagai berikut :

Uraian	2023	2022
Beban Barang		
Beban Barang Pakai Habis	8.033.244.517,27	33.237.447.168,49
Beban Jasa		
Beban Jasa Kantor	11.675.207.525,65	9.038.572.481,00

Belanja Sewa Tanah	31.700.000,0	1.750.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	534.726.500,00	164.680.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	113.057.000,00	101.700.000,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	283.844.000,00	1.057.276.950,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	198.454.025,00	30.420.000,00
Beban Pemeliharaan		
Beban Pemeliharaan Tanah	-	31.465.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	286.896.821,82	167.177.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	247.233.677,57	433.385.190,00
Beban Perjalanan Dinas		
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.021.507.639,00	2.155.027.412,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	191.900.000,00	94.250.000,00
Jumlah	23.620.074.706,31	46.517.496.141,49

3.2.2.1.3 Beban Hibah

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp21.801.770.808,31	Rp1.679.098,00

Realisasi Beban Hibah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2023 sebesar Rp21.801.770.808,31 berupa Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

3.2.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp6.033.675.383,35	Rp4.902.298.287,63

Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.033.675.383,35 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2023	2022
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.407.470.675,11	2.367.609.400,48
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.183.398.746,61	2.119.138.693,94
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	442.805.961,63	415.550.193,21
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
Jumlah	6.033.675.383,35	4.902.298.287,63

3.2.3 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO

Defisit Kegiatan Operasional-LO sebesar Rp93.013.437.993,40 berasal dari Pendapatan-LO sebesar Rp2.779.488.479,57 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp95.792.926.472,97.

Uraian	Jumlah
Pendapatan Operasional	
Pendapatan Asli Daerah	1.456.896.744,50
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.322.591.735,07
Beban Operasional	
Beban Pegawai	(44.337.405.575,00)
Beban Barang dan Jasa	(23.620.074.706,31)
Beban Hibah	(21.801.770.808,31)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	(6.033.675.383,35)
Defisit Operasional	(93.013.437.993,40)

3.2.4 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional-LO

Defisit Non operasional-LO sebesar Rp413.950.884,13 merupakan Surplus Non operasional sebesar Rp593.008.844,16 dikurangi dengan Defisit Non Operasional sebesar Rp1.006.959.728,29. Surplus Non Operasional berasal dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sedangkan Defisit Non Operasional berasal dari Defisit Penjualan Aset Tetap Lainnya.

No	Uraian	Jumlah
1	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	484.525.245,00
2	Surplus Penjualan Hewan Lainnya	108.483.599,16
3	Defisit Penjualan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Perah	(154.799.021,31)
4	Defisit Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	(127.424.662,53)
5	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain- Aset Lain-Lain – Aset Rusak Berat/Usang-LO	(724.736.044,45)
	Jumlah	(413.950.884,13)

Penjelasan dari asal-usul surplus/defisit adalah sebagai berikut :

1. Surplus Non Operasional-LO sebesar Rp484.525.245,00 berasal dari penyesuaian nilai Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga berupa cadangan beras sejumlah 305.749,1 Kg dari harga Rp9.450 ke harga Rp11.175. Cadangan beras tersebut disimpan dan dikerjasamakan oleh PT Taru Martani dan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir.
2. Surplus Penjualan Hewan Lainnya sebesar Rp108.438.599,16 berasal dari nilai penjualan stok semen beku yang diproduksi tahun-tahun sebelumnya oleh UPTD BPPTDK senilai Rp397.366.600,00 dikurangi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp288.883.000,84 sesuai dengan yang tercatat pada detail transaksi pengelola persediaan.
3. Defisit Penjualan Hewan Ternak Perah sebesar Rp154.799.021,31 berasal dari nilai penjualan susu UPT BPPTDK sebesar 71.393 liter dengan nilai penjualan Rp503.320.650,00 (harga perda Rp7.050/liter) dikurangi Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp658.119.671,32 (HPP Rp9.218,27/liter)
4. Defisit Penjualan Tanaman sebesar Rp127.424.662,53 yang berasal dari nilai penjualan benih tanaman pangan dan benih hortikultura UPT BP3MBTP dengan nilai jual sebesar Rp549.179.987,50 dikurangi Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp676.604.650,03.

5. Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain – Aset Lain-Lain – Aset Rusak Berat/Usang- LO senilai Rp724.736.044,45 merupakan koreksi BPK atas pencatatan penghapusan aset yang sebelumnya dicatat pada Beban Pemeliharaan menjadi Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang.

3.2.6 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO sebesar Rp93.427.388.877,53 merupakan jumlah Defisit Operasional sejumlah Rp93.013.437.993,40 dan Surplus Non Operasional sejumlah Rp413.950.884,13.

3.3 RINCIAN DAN PENJELASAN NERACA

3.3.1 Aset

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp252.583.719.895,02	Rp234.964.558.178,55

Aset Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY per 31 Desember 2023 sebesar Rp252.583.719.895,02 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp6.059.208.983,62. Aset Tetap sebesar Rp240.262.036.898,60 dan Aset Lainnya sebesar Rp6.262.474.012,80 dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1.1 Aset Lancar

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp6.059.208.983,62	Rp5.428.442.399,34

Aset Lancar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.059.208.983,62 yang meliputi piutang lainnya dan persediaan dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1.1.1 Piutang Lainnya

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp2.556.272.310,00	Rp1.764.852.705,00

Saldo Piutang Lainnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.556.272.310,00 merupakan cadangan beras yang dititipkan pada pihak ketiga tetapi pada tanggal 31 Desember 2023, pihak ketiga tersebut tidak dapat menyediakan persediaan beras secara fisik. Dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY bekerja sama dengan PT Taru Martani dalam menyimpan cadangan beras dengan tujuan strategis. Nilai beras yang dititipkan pada PT Taru Martani sebesar 305.749,2 Kg. Tanggal 31 Desember 2023 dilakukan stock opname dengan kondisi sebagai berikut.

Kondisi	Kuantitas (Kg)
Beras yang dikerjasamakan	305.749,20
Persediaan di Gudang	77.000,00
Selisih	228.749,20

Sesuai dengan kebijakan akuntansi, selisih cadangan beras tersebut dicatat sebagai bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada pemerintah. Penilaian Piutang Lainnya berasal dari selisih volume cadangan beras sebesar 228.749,20 Kg dikalikan dengan harga pembelian terakhir, yaitu Rp11.175,00 sehingga nilai piutang lainnya per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp2.556.272.310,00.

3.3.1.1.2 Persediaan

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp3.502.936.673,62	Rp3.662.830.694,34

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.502.936.673,62 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.662.830.694,35 dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Persediaan	2023	2022
Bahan Kimia	70.704.570,00	25.336.600,00
Bahan Bakar dan Pelumas	18.100.000,00	6.750.000,00
Bahan/Bibit Tanaman	307.977.000,00	224.479.000,00
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0	157.725.000,00
Bahan Lainnya	126.679.000,00	2.099.650,00
Alat Tulis Kantor	15.372.300,00	3.279.413,67
Kertas dan Cover	9.239.840,80	1.999.088,59
Bahan Cetak	2.745.055,00	6.030.099,25
Benda Pos	2.791.800,00	200.000,00
Bahan Komputer	200.000,00	238.000,00
Perabot Kantor	0	5.674.320,00
Alat Listrik	6.588.900,00	2.384.000,00
Perlengkapan Dinas	4.792.000,00	72.154.995,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	68.978.360,00	27.047.105,00
Obat	20.369.863,00	8.471.710,00
Obat-obatan Lainnya	41.367.395,00	25.745.850,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	5.274.500,00	2.011.730.922,84

Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	1.838.749.689,82	889.502.985,00
Pakan	860.475.000,00	191.763.955,00
Natura dan Pakan Lainnya	102.531.400,00	0,00
Jumlah	3.502.936.673,62	3.662.830.694,34

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.502.936.673,62 termasuk di dalamnya Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga sejumlah Rp1.838.749.689,82 yang merupakan stok beras yang dikerjasamakan dengan PT Taru Martani sebagai cadangan pangan. Sesuai dengan perjanjian antara Kepala DPKP dengan PT Taru Martani, PT Taru Martani mempunyai kewajiban untuk menyediakan persediaan beras di Gudang sebesar minimal 25% dari total cadangan beras yang dititipkan. Sesuai dengan kebijakan akuntansi nilai persediaan beras diukur menggunakan harga pembelian terakhir, sehingga nilai persediaan beras dengan nilai Rp860.475.000,00 berasal dari hasil *stock opname* Gudang sejumlah 77.000 Kg dikalikan harga pembelian terakhir Rp11.175,00. Selain itu juga terdapat Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat yang merupakan hasil produksi yang saat ini dikelola oleh UPTD.

Adapun jumlah persediaan dibanding tahun 2022, telah turun sebesar Rp159.894.020,73. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

- *Mutasi Tambah*

1. Belanja Persediaan sejumlah Rp28.470.465.002,00.
2. Kenaikan persediaan karena usia hewan dan tanaman, berkembang biak, persediaan dari hasil produksi senilai Rp889.503.895,07.
3. Reklasifikasi Aset Alat Laboratorium ke Persediaan senilai Rp221.502.000,00 sesuai Berita Acara Nomor BA.Reklas.1/BMD/13102/X/2023.
4. Reklasifikasi Aset Alat Laboratorium ke Persediaan senilai Rp7.204.000,00 sesuai Berita Acara Nomor BA.Reklas.1/BMD/13776/X/2023.
5. Reklasifikasi Aset Alat Laboratorium ke Persediaan senilai Rp58.834.735,00 sesuai Berita Acara Nomor BA.Reklas.1/BMD/13775/X/2023.
6. Reklasifikasi Aset Alat Laboratorium ke Persediaan senilai Rp38.494.400,00 sesuai Berita Acara Nomor BA.Reklas.1/BMD/1303/X/2023.

7. Reklasifikasi Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi IPA Lanjutan sejumlah Rp2.850.000,00 sesuai BA.Reklas.1/BMD/00.2.1/17136/XII/2023.
 8. Reklasifikasi Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sejumlah Rp3.542.000,00 sesuai BA.Reklas.1/BMD/00.2.1/17138/XII/2023.
 9. Reklasifikasi Belanja Modal Alat Peternakan sejumlah Rp.125.000,00 sesuai BA.Reklas.1/BMD/00.2.1/17137/XII/2023.
 10. Pengakuan HPP produksi dari belanja selain belanja persediaan sejumlah Rp741.924.476,96.
 11. Reklasifikasi pencatatan dari Beban Pemeliharaan ke Persediaan sejumlah Rp9.915,00.
 12. Reklasifikasi piutang lain-lain ke persediaan untuk dihitung kembali menggunakan harga pembelian terakhir sejumlah Rp1.764.852.705,00.
 13. Kenaikan nilai cadangan beras karena harga pembelian terakhir naik sejumlah Rp484.525.245,00.
- *Mutasi kurang*
 1. Pembebanan persediaan selama tahun 2023 sejumlah Rp28.656.008.862,58.
 2. Mutasi persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat selama tahun 2023 sejumlah Rp1.623.607.322,18.
 3. Reklasifikasi Persediaan ke Beban Jasa terkait Dekorasi sejumlah Rp5.000.000,00.
 4. Cadangan beras yang diedarkan oleh PT Taru Martani sejumlah Rp2.556.272.310,00.
 5. Reklasifikasi dari Persediaan ke Aset sejumlah Rp1.927.900,00 berdasarkan Berita Acara Nomor BA.Reklas.2/BMD/5840/VIII/2023.
 6. Reklasifikasi dari Persediaan ke Aset sejumlah Rp911.000,00 berdasarkan BA.Reklas.2/BMD/5841/VIII/2023.

3.3.1.2 Aset Tetap

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp240.262.036.898,60	Rp227.417.155.488,62

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp240.262.036.898,60 merupakan nilai buku aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp307.098.340.669,00 dikurangi Akumulasi

Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp66.836.303.770,22 dengan rincian sebagai berikut

3.3.1.2.1 Tanah

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp122.199.307.899,00	Rp126.780.807.899,00

Saldo Aset Tetap Tanah sebesar Rp122.199.307.899,00 diklasifikasikan sebagai berikut :

Uraian	2023	2022
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	78.044.500.000,00	70.616.350.000,00
Tanah Kering	200.310.000,00	0
Tanah Perkebunan	1.349.500.000,00	3.322.000.000,00
Tanah Pertanian	35.453.850.000,00	45.856.310.000,00
Tanah Kampung	7.151.147.899,00	6.986.147.899,00
Jumlah	122.199.307.899,00	126.780.807.899,00

Berdasarkan data pada tabel di atas, nilai tanah pada Tahun 2023 turun sebesar Rp4.581.500,00. Transaksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- *Mutasi kurang*
 1. Berkurangnya saldo Tanah sejumlah Rp4.581.500.000,00 merupakan Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Aset Kemitraan. Transaksi ini berdasarkan Perjanjian sewa antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT Taru Martani Nomor 3/PERJ/SEKDA/II/2023 tentang Sewa menyewa sebagian tanah dan bangunan yang terletak di Ngipiksari, Harjobinangun, Pakem, Sleman tanggal 23 Februari 2023.
 2. Terdapat reklasifikasi antar rekening aset tetap tanah berdasarkan hasil inventarisasi tanah pada BP3MBTP.

Adapun rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Induk	38.395.549.000,00
BP3MBTP	69.799.197.899,00
BPPTDK	14.004.561.000,00
Jumlah	122.199.307.899,00

3.3.1.2.2 Peralatan dan Mesin

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp53.960.575.622,83	Rp44.663.727.735,83

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp53.960.575.622,83 dapat dirinci sebagai berikut

Uraian	2023	2022
Alat Besar	3.045.280.879,99	2.471.180.879,99
Alat Angkutan	8.528.057.390,00	8.200.850.390,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	411.350.306,00	328.350.306,00
Alat Pertanian	11.953.930.466,97	9.136.716.449,96
Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.911.019.718,90	8.311.153.560,90
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.626.984.562,00	1.589.000.850,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	364.064.115,00	149.690.115,00
Alat Laboratorium	15.643.998.338,99	11.298.370.338,99
Komputer	3.356.942.612,98	3.059.467.612,98
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	38.499.000,00	38.499.000,00
Alat Keselamatan Kerja	30.900.000,00	30.900.000,00
Rambu-rambu	49.548.232,00	49.548.232,00
Jumlah	53.960.575.622,83	44.663.727.735,83

Pada tahun 2023, Aset Tetap Peralatan dan Mesin naik sejumlah Rp9.296.847.887,00 terdapat beberapa mutasi terkait dengan saldo aset Peralatan dan mesin meliputi beberapa hal berikut:

- *Mutasi Tambah*

1. Belanja Modal Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sejumlah Rp9.532.170.265,00.
2. Reklasifikasi dari Persediaan sejumlah Rp1.927.900,00 berdasarkan Berita Acara Nomor BA.Reklas.2/BMD/5840/VIII/2023.
3. Reklasifikasi dari Persediaan sejumlah Rp911.000,00 berdasarkan BA.Reklas.2/BMD/5841/VIII/2023.
4. Hibah barang berupa Alat Pendingin (*Cold Storage*) dengan nilai buku sebesar Rp243.706.840,00 dari Badan Pangan Nasional sebagaimana tertuang dalam BAST Nomor 885/PL.02.03/A/04/2023 tanggal 3 April 2023.
5. Hibah barang berupa minibus dengan nilai buku Rp135.750.000,00 dari Badan Pangan Nasional sebagaimana tertuang dalam BAST Nomor 1221/PL.02.03/A/05/2023 tanggal 15 Mei 2023.
6. Hibah barang berupa sepeda motor yang telah digunakan sebagai penunjang tugas di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dengan nilai buku Rp0,00 dari Badan Penyuluhan dan Pengembanaan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian sebagaimana tertuang dalam BAST Barang Milik Negara Nomor 15212/PL.130/I.1/06/2022 tanggal 7 Juni 2022.

- *Mutasi kurang*

1. Usul hapus sepeda motor dengan nilai buku Rp4.500.000,00 berdasarkan Usulan Penghapusan Nomor 933/6669 tanggal 9 Juni 2023.
2. Usul hapus kendaraan minibus dengan nilai buku Rp30.000.000,00 dan sepeda motor Rp14.600.000,00 berdasarkan Usulan Penghapusan Nomor 933/01238 tanggal 13 Juni 2023.
3. Usul hapus kendaraan operasional berupa mini bus dengan nilai perolehan Rp24.000.000,00 dan nilai buku Rp0,00 beserta sepeda motor dengan nilai perolehan Rp151.690.000,00 dan nilai buku Rp0,00 berdasarkan Usulan Penghapusan Nomor 933/07446 tanggal 8 Juni 2023.
4. Usul hapus kendaraan operasional dengan nilai perolehan Rp30.800.000,00 dan nilai buku Rp0,00 berdasarkan Usulan Penghapusan Nomor 933/12994 tanggal 19 September 2023.
5. Reklasifikasi Aset Alat Laboratorium ke Persediaan senilai Rp221.502.000,00 sesuai Berita Acara Nomor BA.Reklas.1/BMD/13102/X/2023.

6. Reklasifikasi Aset Alat Laboratorium ke Persediaan senilai Rp7.204.000,00 sesuai Berita Acara Nomor BA.Reklas.1/BMD/13776/X/2023.
7. Reklasifikasi Aset Alat Laboratorium ke Persediaan senilai Rp58.834.735,00 sesuai Berita Acara Nomor BA.Reklas.1/BMD/13775/X/2023.
8. Reklasifikasi Aset Alat Laboratorium ke Persediaan senilai Rp38.494.400,00 sesuai Berita Acara Nomor BA.Reklas.1/BMD/13 03/X/2023.
9. Reklasifikasi Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi IPA Lanjutan sejumlah Rp2.850.000,00 sesuai BA.Reklas.1/BMD/00.2.1/17136/XII/2023.
10. Reklasifikasi Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sejumlah Rp3.542.000,00 sesuai BA.Reklas.1/BMD/00.2.1/17138/XII/2023.
11. Reklasifikasi Belanja Modal Alat Peternakan sejumlah Rp.125.000,00 sesuai BA.Reklas.1/BMD/00.2.1/17137/XII/2023.
12. Reklasifikasi belanja antar rekening Aset sejumlah Rp25.315.000 (Sumur Lainnya) ke Sumur (Aset Tetap Jalan, Irigasi, Jaringan).
13. Aset yang dicatat sebagai ekstrakomptabel sejumlah Rp2.303.000,00
14. Koreksi BPK sejumlah Rp1.857.983,00 yang merupakan kelebihan ongkos kirim pembelian peralatan pertanian BP3MBTP oleh CV. Karya Hidup Sentosa.

Adapun rincian saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 di PA dan KPA adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Induk	30.362.265.527,81
BP3MBTP	11.066.909.181,04
BPPTDK	12.531.400.913,98
Jumlah	53.960.575.622,83

3.3.1.2.3 Gedung dan Bangunan

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp120.290.161.392,48	Rp107.307.602.515,48

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp120.290.161.392,45 dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	2023	2022
Bangunan Gedung Kantor	78.203.262.485,98	76.686.077.835,98
Bangunan Gudang	7.242.059.057,80	6.241.208.656,80
Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	22.100.000,00	22.100.000,00
Bangunan Gedung Instalasi	116.870.000,00	106.870.000,00
Bangunan Gedung Laboratorium	8.770.092.750,00	3.023.563.200,00
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	132.453.740,00	132.453.740,00
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.392.792.500,00	1.197.006.500,00
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.286.693.460,00	1.286.693.460,00
Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	43.635.145,00	43.635.145,00
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	541.081.329,00	541.081.329,00
Bangunan Gedung Garasi/Pool	625.106.711,00	625.106.711,00
Bangunan Rumah Tahanan	333.888.500,00	333.888.500,00
Bangunan Peternakan/Perikanan	10.531.595.399,70	10.385.003.399,70
Bangunan Terbuka	536.570.850,00	35.705.850,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.516.142.929,00	767.932.338,00
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	450.812.600,00	450.812.600,00
Asrama	5.337.526.250,00	5.337.526.250,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	28.800.000,00	28.800.000,00
Tugu	47.750.000,00	47.750.000,00
Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	14.387.000,00	14.387.000,00
Pagar	3.116.540.685,00	0,00
Jumlah	120.290.161.392,48	107.307.602.515,48

Transaksi mutasi saldo Gedung dan Bangunan pada tahun 2023 naik sebesar Rp12.982.558.877,00 meliputi hal-hal berikut:

- *Mutasi tambah*
 1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp12.994.325.977,00
 2. Mutasi tambah karena reklasifikasi antar rekening aset tetap dari Instalasi Lain (Aset Jalan, Irigasi Jaringan) Rp10.000.000,00
- *Mutasi kurang*
 1. Mutasi kurang karena reklasifikasi antar rekening aset tetap berupa Bangunan Laboratorium ke Jalan Khusus (Aset Jalan, Irigasi, Jaringan) Rp21.767.100,00.

Adapun rincian saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Induk	96.559.295.872,48
BP3MBTP	15.358.664.833,00
BPPTDK	8.372.200.687,00
Jumlah	120.290.161.392,45

3.3.1.2.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp8.739.849.216,00	Rp7.858.689.420,00

Saldo Jalan, Irigasi, Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.739.849.216,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	2023	2022
Jalan	3.428.487.586,00	2.572.642.790,00
Jembatan	2.000.000,00	2.000.000,00
Bangunan Air Irigasi	1.227.708.270,00	1.227.708.270,00
Bangunan Pengairan Pasang Surut	588.899.460,00	588.899.460,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	319.951.755,00	319.951.755,00

Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	321.923.733,00	296.608.733,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.395.488.761,90	1.395.488.761,90
Bangunan Air Kotor	225.435.000,00	225.435.000,00
Instalasi Air Bersih/Air Baku	6.495.900,00	6.495.900,00
Instalasi Air Kotor	105.258.000,00	105.258.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik	563.044.781,00	563.044.781,00
Instalasi Pengaman	59.757.000,00	59.757.000,00
Jaringan Air Minum	67.704.960,10	67.704.960,10
Jaringan Listrik	409.596.359,00	409.596.359,00
Jaringan Telepon	18.097.650,00	18.097.650,00
Jumlah	8.739.849.216,00	7.858.689.420,00

Selama tahun 2023 terdapat kenaikan nilai Aset Jalan, Irigasi, Jaringan senilai Rp881.159.796,00 yang disebabkan karena transaksi berikut :

- *Mutasi tambah*
 1. Belanja Modal Aset Jalan, Irigasi, Jaringan sebesar Rp844.077.696,00.
 2. Reklasifikasi antar aset berupa Jalan Khusus dari Bangunan Laboratorium sebesar Rp21.767.000,00.
 3. Reklasifikasi antar rekening aset berupa Sumur dari Sumur Lainnya (Peralatan dan Mesin) sebesar Rp25.315.000,00.
- *Mutasi kurang*
 1. Reklasifikasi antar rekening aset berupa Instalasi ke Bangunan Instalasi (Gedung dan Bangunan) sebesar Rp10.000.000,00.

Adapun rincian saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Induk	4.339.214.538,00
BP3MBTP	4.083.464.578,00
BPPTDK	317.170.100,00
Jumlah	8.739.849.216,00

3.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp1.845.076.913,51	Rp1.801.176.680,18

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.845.076.913,51 dapat dirinci sebagai berikut.

Uraian	2023	2022
Bahan Perpustakaan	27.498.980,00	27.514.080,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	5.280.000,00	280.000,00
Hewan	1.633.897.933,31	1.594.982.599,98
Biota Perairan	2.400.000,00	2.400.000,00
Tanaman	176.000.000,20	176.000.000,20
Jumlah	1.845.076.913,51	1.801.176.680,18

Selama tahun 2023, aset tetap lainnya naik sebesar Rp43.900.233,33 terdapat beberapa mutasi Aset Tetap Lainnya yang meliputi di antaranya:

- *Mutasi tambah*
 1. Belanja Modal Aset Lainnya Rp174.400.000,00
 2. Hibah barang berupa ternak sapi simental jantan senilai Rp70.000.000,00 dari Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Padang Mengatas, Kementan RI sebagaimana tertuang dalam BAST Nomor 478/PL.130/F2.G/05/2023 pada tanggal 10 Mei 2023.
 3. Hibah barang berupa ternak pedet jantan senilai Rp10.000.000,00 dari Balai Embrio Ternak Cipelang Kementan RI sebagaimana tertuang dalam BAST Nomor B-11003/PK.010/F2.D/2023 tanggal 11 Mei 2023.
 4. Hasil verifikasi aset berupa sapi perah sejumlah Rp42.000.000,00; Sapi Potong sejumlah Rp27.000.000,00; domba sejumlah Rp3.750.000,00, Kambing Rp3.500.000,00 berdasarkan Berita Acara Nomor 028/17054.

- *Mutasi kurang*
 1. Usul hapus ternak berupa sapi perah dengan nilai buku Rp15.000.000, sapi potong sebesar Rp.168.278.400,00, kambing Rp500.000,00 berdasarkan Usulan Penghapusan Nomor 933/6669 tanggal 9 Juni 2023.
 2. Usul hapus ternak berupa Sapi Potong karena mati dengan nilai perolehan Rp18.670.400,00 berdasarkan Usulan Penghapusan Nomor 933/00851 tanggal 17 April 2023.
 3. Usul hapus ternak berupa Kambing Perah (Kambing Saneen Jantan) dengan nilai buku Rp5.646.666,67 dan Sapi Potong dengan nilai buku Rp78.639.200,00 berdasarkan Usulan Penghapusan Nomor 933/13001 tanggal 10 Oktober 2023.
 4. Usul hapus buku ilmu pengetahuan praktis dengan nilai buku Rp15.100,00 berdasarkan Usulan Penghapusan Nomor 933/01238 tanggal 13 Juni 2023.

Adapun rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut.

Uraian	Jumlah
Induk	198.239.580,00
BP3MBTP	180.973.000,20
BPPTDK	1.465.864.333,31
Jumlah	1.845.076.913,51

3.3.1.2.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp63.369.625,00	Rp63.369.625,00

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp63.369.625,00.

3.3.1.2.7 Akumulasi Penyusutan

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp66.836.303.770,22	Rp61.058.218.386,87

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp66.836.303.770,22 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(38.879.828.614,48)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(24.523.729.621,63)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(3.432.745.534,11)
Jumlah	66.836.303.770,22

Terdapat kenaikan nilai Akumulasi penyusutan sebesar Rp5.778.085.383,35 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- *Mutasi tambah*
 1. Penambahan akibat Beban Penyusutan tahun berjalan sejumlah Rp6.033.675.383,35.
- *Mutasi kurang*
 1. Usul hapus sepeda motor dengan nilai buku Rp4.500.000,00 berdasarkan Usulan Penghapusan Nomor 933/6669 tanggal 9 Juni 2023.
 2. Usul hapus kendaraan minibus dengan nilai penyusutan Rp30.000.000,00 dan sepeda motor dengan nilai penyusutan Rp14.600.000,00 berdasarkan Usulan Penghapusan Nomor 933/01238 tanggal 13 Juni 2023.
 3. Usul hapus kendaraan operasional berupa mini bus dengan nilai penyusutan Rp24.000.000,00 beserta sepeda motor dengan nilai penyusutan Rp151.690.000,00 berdasarkan Usulan Penghapusan Nomor 933/07446 tanggal 8 Juni 2023.
 4. Usul hapus kendaraan operasional dengan nilai akumulasi penyusutan Rp30.800.000,00 berdasarkan Usulan Penghapusan Nomor 933/12994 tanggal 19 September 2023.

3.3.1.2.8 Aset Lainnya

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp6.262.474.012,80	Rp2.118.960.290,58

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.262.474.012,80 yang meliputi Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Uraian	2023	2022
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	4.581.500.000,00	0
Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.206.325.780,00	1.206.325.780,00
Aset Rusak Berat/Usang	869.730.060,00	912.634.510,58
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(395.081.827,20)	0
Jumlah	6.262.474.012,80	2.118.960.290,58

Terdapat kenaikan nilai Aset lainnya dari tahun 2022-2023 sejumlah Rp4.143.513.722,22 dengan rincian sebagai berikut:

- *Mutasi tambah*
 1. Penambahan Aset Kemitraan sebesar Rp4.581.500.000,00 berupa Sewa yang saldonya berasal dari reklasifikasi Aset Tetap Tanah. Transaksi ini berdasarkan Perjanjian sewa antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT Taru Martani Nomor 3/PERJ/SEKDA/II/2023 tentang Sewa menyewa sebagian tanah dan bangunan yang terletak di Ngipiksari, Harjobinangun, Pakem, Sleman tanggal 23 Februari 2023.
 2. Penyesuaian nilai karena munculnya akun akumulasi penyusutan Aset Rusak sehingga menambah nilai Aset Lainnya sebesar Rp406.508.501,42.
 3. Usulan Penghapusan Nomor 933/00851 tanggal 17 April 2023 sejumlah Rp18.670.400,00.
 4. Usulan Penghapusan Nomor 933/6669 tanggal 09 Juni 2023 sejumlah Rp 188,278,400.00.
 5. Usulan Penghapusan Nomor 933/01238 tanggal 13 Juni 2023.sebesar Rp 44,615,100.00
 6. Usulan Penghapusan Nomor 933/07446 tanggal 8 Juni 2023 sebesar Rp175.690.000,00.
 7. Usulan Penghapusan Nomor 933/12994 tanggal 19 September 2023 sejumlah Rp30.800.000,00.
 8. Usulan Penghapusan Nomor 933/13001 tanggal 10 Oktober 2023 sejumlah Rp76.639.200,00.

9. Usulan Penghapusan Nomor 933/13001 tanggal 10 Oktober 2023 sejumlah Rp5.646.667,00.

- *Mutasi kurang*

1. Penghapusan Aset Rusak/Usang sejumlah Rp991.752.719,00

3.3.2 Kewajiban

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp97.351.398,00	Rp92.892.721,00

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp97.351.398,00 merupakan kewajiban atas layanan barang/jasa yang telah dikonsumsi oleh SKPD namun belum dibayar oleh SKPD dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah
Tagihan Telepon	1.040.837,00
Tagihan Air	1.972.415,00
Tagihan Listrik	94.058.146,00
Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	280.000,00

3.3.3 Ekuitas

<u>2023</u>	<u>2022 (Audited)</u>
Rp252.486.368.497,02	Rp237.362.356.149,71

Saldo ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp252.486.368.497,02 yang merupakan kekayaan bersih Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2023 yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023
1	EKUITAS	234.947.915.457,55
2	Surplus/Defisit – LO	(93.427.388.877,53)
3	RK PPKD	110.965.841.917,00
	Jumlah	252.486.368.497,02

3.4 RINCIAN DAN PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Saldo Ekuitas sebesar Rp252.486.368.497,02 merupakan kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD pada tanggal 31 Desember 2023 Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2023
1	EKUITAS AWAL	234.871.665.457,55
2	Surplus/Defisit – LO	(93.427.388.877,53)
3	RK PPKD	110.965.841.917,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	76.250.000,00
5	JUMLAH EKUITAS AKHIR	252.486.368.497,02

Dampak kumulatif perubahan sebesar Rp76.250.000,00 merupakan hasil verifikasi aset pada triwulan 4 . Hasil verifikasi aset merupakan pengakuan persediaan yang memenuhi nilai kapitalisasi ,meliputi : sapi perah sejumlah Rp42.000.000,00; Sapi Potong sejumlah Rp27.000.000,00; domba sejumlah Rp3.750.000,00, Kambing Rp3.500.000,00 . Hal ini berdasarkan Berita Acara Nomor 028/17054 tanggal 20 Desember 2023.

BAB IV

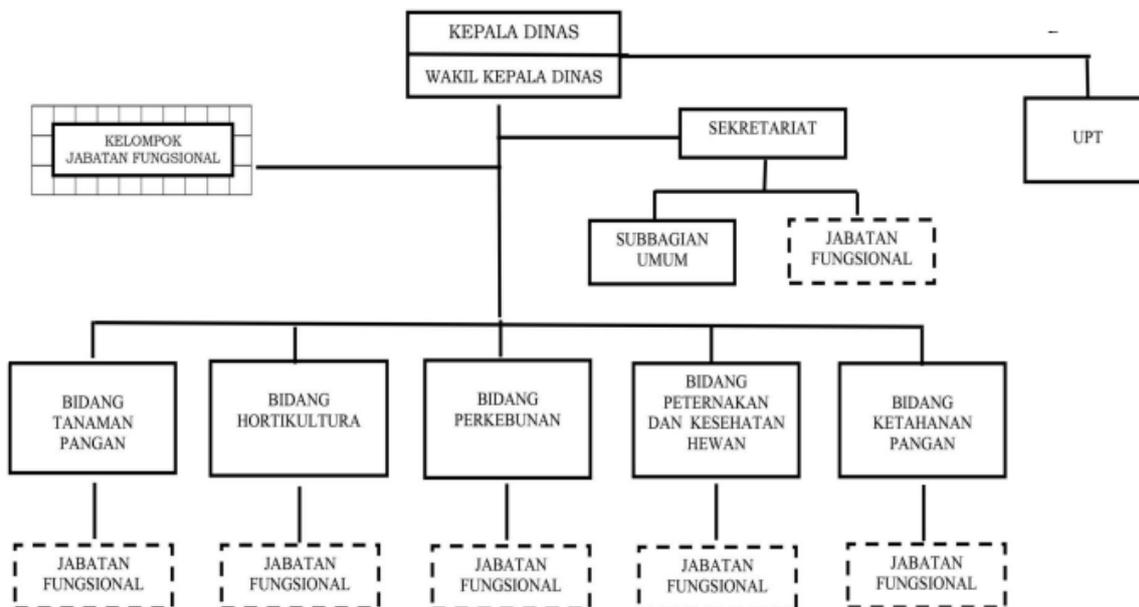
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

SKPD

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7) menjadi salah satu dasar hukum dalam penyusunan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY atau disingkat dengan DPKP DIY merupakan instansi baru yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2019, yang merupakan gabungan dari 3 instansi yang dijadikan satu, yaitu Dinas Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Bidang Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur DIY melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah DIY. Kelembagaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (DPKP DIY) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2022 tersusun dari Sekretariat Dinas, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Bidang Ketahanan Pangan. Pada Pasal 3 disebutkan Susunan Organisasi DPKP DIY, terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Wakil Kepala Dinas;
3. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum;
4. Bidang Tanaman Pangan;
5. Bidang Hortikultura;
6. Bidang Perkebunan;
7. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Bidang Ketahanan Pangan;
9. Unit Pelaksana Teknis; dan
10. Jabatan Fungsional.



DPKP DIY memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang kelembagaannya diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada DPKP DIY. UPT pada DPKP DIY terbagi menjadi 4, yaitu :

a. UPT Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian

Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian (BP3MBTP) bertugas melaksanakan pengembangan perbenihan dan pengawasan mutu benih tanaman pertanian, meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk meningkatkan persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi dan jumlah sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan.

b. UPT Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pertanian untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia pertanian.

c. UPT Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan

Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan bibit/benih ternak, pakan ternak, dan diagnostik kehewan untuk meningkatkan persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi.

d. UPT Balai Proteksi Tanaman Pertanian.

Balai Proteksi Tanaman Pertanian mempunyai tugas melaksanakan proteksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk meningkatkan persentase pertanaman aman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan dan dampak perubahan iklim.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2023 (*Audited*) merupakan laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang selambat-lambatnya harus diterapkan pada Tahun 2015.

Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2023(*Audited*) merupakan hasil konsolidasi Laporan Keuangan dengan Entitas Akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran dan disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Untuk penyajian aset tetap di neraca didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Aset.

Perencanaan anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2023 (*Audited*) yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.